



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2020/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGONTO**
2. Jabatan : **STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM**
3. NHK : **106803**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.243.800.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m²/142 m² di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 469 m² di KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 211.050.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m²/192 m² di KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 1475 m² di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 132.750.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 96.500.000**

1. MOTOR, HONDA ASTREA PRIMA SEPEDA MOTOR Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 43.950.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 110.537.416****F. HARTA LAINNYA** **Rp. 47.500.000**



Sub Total	Rp.	1.542.287.416
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.542.287.416

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.